



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

RENCANA KERJA (RENJA) 2021



**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
(DISPARBUD)**

Jln. San Juan No.211. Telp (0383) 21258
Sarotari - Larantuka

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
BAB. I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Disparbud	7
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Disparbud.....	7
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	17
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	21
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	22
3.3. Program dan Kegiatan	23
BAB IV PENUTUP	24

DAFTAR TABEL :

- Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019 Kabupaten Flores Timur;
- Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur,
- Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020
- Tabel 2.5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DKPD Tahun 2021 dan Prakiran Maju Tahun 2022 Kabupaten Flores Timur

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan RahmatNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur merupakan penjabaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun ke-4 dan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur bertujuan sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada masa yang akan datang.

Semoga Tuhan dan Lewotana selalu menyertai kita dalam tugas dan pengabdian untuk mewujudkan Flores Timur Sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata.

Larantuka, 01 Oktober 2020

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur,

Apolonia Corebima, SE,M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19690718 199703 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkewajiban menyusun RENJA (Rencana Kerja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan pembangunan daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Flores Timur untuk tahun 2021.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENJA-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis OPD. RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, serta analisis kinerja.

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata dan kebudayaan agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Pariwisata dan Kebudayaan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan Perencanaan Strategis Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Flores Timur

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD yang dilanjutkan dengan RENJA OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Menurut Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur; disebutkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing;
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - d. Pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan Pariwisata dan Kebudayaan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- p. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu (1) tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja, landasan hukum serta sistematika penyusunan rencana kerja;
- Bab 2 Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun lalu, memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;
- Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, memuat Telaahan Terhadap Kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan;
- Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab 5 Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2029

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 Dan Capaian Renstra

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun lalu adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra tahun 2017 – 2022. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran - sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 juga memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2021;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- c. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019 dan tahun berjalan (2020) dapat diproyeksikan (lampiran tabel 2.1)

2.2 Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Pencapaian target ini tidak lepas dari komitmen Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi guna mengemban Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yaitu Visi “ Terwujudnya Kepariwisata Kabupaten Flores Timur yang Maju berbasis Budaya Lokal” dan Misi 1 dan 2 . Misi 1 adalah “Meningkatkan Peran Orang Muda dalam membangun Budaya Lamaholot” dan Misi 2 adalah “ Mengembangkan wisata bahari yang berbasis pelestarian lingkungan perairan dan pantai”

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur belum memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Pariwisata dan Kebudayaan digunakan indikator lainnya meliputi Aspek Penilaian pada tataran pengambil kebijakan,Aspek Pelaksana Kebijakan dan Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan *analisis kebutuhan pelayanan* sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Persentase seni budaya yang terlestarikan meningkat melalui upaya pembinaan dan pelatihan serta menghidupkan aktivitas seni budaya dengan melibatkan para pelaku seni budaya dalam penyelenggaraan even-event / pagelaran / pentas.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur mempunyai **tugas melaksanakan urusan wajib bidang kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dengan kewenangan dan fungsi sebagai berikut :**

1. Penyusunan Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan/kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.
4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten/kota.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan Kabupaten/kota dibidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

6. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten/kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten/kota.
7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten/kota.
8. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten/kota.
9. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan.
10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan /kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.
11. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.
12. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten/kota.
13. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten/kota.
14. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten/kota.
15. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
16. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota.
17. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat kabupaten/kota.
18. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten/ kota.
19. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada dan Negara skala kabupaten/kota.
20. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten/ kota.
21. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset benda kesenian (karya seni) skala kabupaten/kota.

22. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten/kota
23. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
24. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten/kota.
25. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten/kota.
26. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
27. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
28. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.
29. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten/kota.
30. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten/kota.
31. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai *database* dan sistem informasi geografi sejarah.
32. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten/kota.
33. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten/kota
34. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" skala kabupaten/kota.
35. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
36. Penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
37. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten/kota.
38. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
39. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten/kota.

40. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten/ kota.
41. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten/kota, meliputi:
 - a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
 - b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.
 - c. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
 - d. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
42. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten/kota meliputi :
 - a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
 - b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.
 - c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
 - d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten/kota.
 - e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten/kota.
 - f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten/kota.
43. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten/kota.
44. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten/kota.
45. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten/kota.
46. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten/kota.
47. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten/kota.
48. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten/ kota.
Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten/ kota.
49. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten/kota.
50. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten/kota
51. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten/kota.
52. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
53. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten/ kota.
54. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten/kota.

55. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten/ kota.
56. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten/ kota.
57. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten/kota.
58. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten/kota.
59. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten/kota.
60. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten/kota.
61. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten/kota.
62. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten/kota.
63. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten/kota.
64. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di
65. tingkat kabupaten/kota.
66. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten/ kota.
67. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten/ kota.
68. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten/kota.
69. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten/kota
70. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten/kota.
71. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
72. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten/ kota.
73. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten/kota.
74. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten/ kota.
75. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten/ kota.
76. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten/kota.
77. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten/kota.
78. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten/kota.
79. Pemetaan sejarah skala kabupaten/kota.
80. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten/kota.
81. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.
82. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/kota.
83. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.

84. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
85. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.
86. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/kota.
87. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
88. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
89. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.
90. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/kota.
91. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
92. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
93. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.
94. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/kota.
95. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
96. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
97. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
98. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.
99. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten/kota.
100. Registrasi museum dan koleksi di kabupaten/kota.
101. Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten/kota.
102. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten/kota.

- 103 Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten/kota :
- RIPPDA kabupaten/kota.
 - Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan system informasi pariwisata.
 - Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.
 - Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/ kota.
 - Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten/ kota.
 - Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten/kota.
 - Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata skala kabupaten/kota.
 - Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota.
 - Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten/kota.
104. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten/ kota.
105. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota.
106. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota.
107. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten/kota.
108. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten/kota :
- Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
 - Peserta/penyelenggara pameran/ *event*, *roadshow* bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.
 - Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten/ kota.
 - Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten/kota.
 - Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten/ kota.
 - Pelaksanaan *event* promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. Pengembangan system informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten/kota.

109. Penerapan *branding* pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata skala kabupaten/kota.
110. Rencana induk pengembangan sumber daya Pariwisata dan Kebudayaan nasional skala kabupaten/kota.
111. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan sumber daya manusia Pariwisata dan Kebudayaan skala kabupaten/kota.
Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota
112. penelitian Pariwisata dan Kebudayaan skala kabupaten/kota.
Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten/kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu penting diarahkan sebagai sebuah kondisi aktual yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setiap tahunnya.

Berdasarkan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal, maka isu-isu penting tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan aspek SDM

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pariwisata dan Kebudayaan SDM menjadi faktor yang sangat penting, artinya dalam mendukung penjabaran Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, baik pada tatanan perencanaan maupun pelaksanaan. Ketersediaan SDM yang memadai, yang berkorelasi dengan tugas dan fungsi OPD diharapkan mampu menjabarkan dan merealisasi Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kualitas SDM aparatur juga harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, visioner, inovatif, kreatif serta responsive terhadap fenomena kemajuan global.

Disamping itu, kekuatan SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif diharapkan juga bertumbuh dan berkembang pada sector swasta yang menjalankan usaha jasa di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Trend pertumbuhan pariwisata internasional sebagai sebuah industry terbesar berdasarkan fenomena yang bertumbuh saat ini, pariwisata telah menjadi sebuah sector industry yang mampu mendatangkan manfaat (benefit) dan keuntungan (profitable) yang sangat besar serta memiliki dampak berganda. Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan internasional dewasa ini memiliki kemajuan yang sangat pesat sehingga sektor Pariwisata dan Kebudayaan telah menjadi sektor pembangunan vital bagi Negara-negara yang menjadi destinasi pariwisata, khususnya Negara-negara berkembang. Pemerintah Indonesia bahkan mencanangkan sector ini sebagai pemasok devisa terbesar dalam menopang pembangunan nasional demi meningkatkan perekonomian bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

3. Pariwisata dan Kebudayaan berbasis masyarakat (Community Based on Tourism) Program

Pariwisata dan Kebudayaan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perkapita, pelestarian nilai-nilai sosial budaya lokal, yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata, oleh karena itu partisipasi masyarakat harus menjadi perhatian untuk dilibatkan secara utuh dalam seluruh proses pembangunan.

Peran aktif masyarakat harus dipecahkan sejak tahapan pelaksanaan hingga pelaksanaannya.

Peran masyarakat harus diberdayakan secara maksimal dan optimal.

4. Pariwisata dan Kebudayaan berbasis lingkungan

Sektor Pariwisata dan Kebudayaan dewasa ini telah dikategorikan sebagai agen yang membawa perubahan (agent of change) dalam segala aspek, baik yang positif maupun yang negative. Wacana pelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu aspek yang disoroti karena kehadiran kepariwisataan dianggap rentan mengganggu kelestarian lingkungan.

5. Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan yang berkelanjutan (Sustainable Tourism Development)

Untuk mewujudkan pembangunan bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang dapat membawa manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi peningkatan perekonomian sekaligus meminimalisir dampak-dampak negative yang ditimbulkan dari aktivitas kepariwisataan, maka diperlukan sebuah konsep perencanaan destinasi pariwisata secara tepat, sistematis dan integrative.

6. Peningkatan efisiensi dan efektifitas, koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam mendukung upaya-upaya pembangunan bidang kebudayaan dan kepariwisataan. Membangun kerjasama secara efektif dan efisien sangat dibutuhkan untuk membuka akses terhadap program-program eksternal yang memperkuat perencanaan-perencanaan internal. Pemerintah Daerah diharapkan responsive terhadap peluang-peluang tawaran kerjasama yang datang dari berbagai pihak sebagai langkah strategis dalam mewujudkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran pembangunan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan dan penelaahan untuk point ini akan dilakukan setelah pelaksanaan Musrenbang OPD di Kecamatan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Flores Timur

No	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3		4	5
1	Penataan Lokasi Istana Raja Larantuka	Larantuka	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Paket	
2	Peningkatan jalan Pariwisata	Kabupaten Flores Timur	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	15 Km	
3	Pelatihan kelompok penggerak sadar wisata desa	Kabupaten Flores Timur	Pengembangan SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya	1 Paket	
4	Pembangunan Joging Track pada kawasan wisata pantai	Larantuka	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Paket	
5	Pembangunan Pos Pengaman Laut dan Mercusuar dalam mendukung Destinasi Pariwisata Mekko	Kabupaten Flores Timur	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Paket	
6	Pemugaran situs peninggalan sejarah Tugu Van Der Berg	Kabupaten Flores Timur	Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	1 Paket	
7	Pengembangan Obyek Wisata	Kabupaten Flores Timur	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	3 Unit	
8	Pengembangan Wisata Religius Trapist Lamanabi	Larantuka	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Paket	
9	Pembangunan MCK, dan Ruang ganti	Kabupaten Flores Timur	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Paket	

10	Penataan Lokasi Pulau Waibalun	Larantuka	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Paket	
11	Pembangunan Gapura Tuan Meninu	Larantuka	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Paket	
12	Pembangunan rabat jalan	Kabupaten Flores Timur	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi	3 Paket	
13	Inventaris unsur-unsur kebudayaan, advokasi, promosi dan pengembangan serta pembangunan museum sejarah.	Kabupaten Flores Timur	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	1 paket	
14	Dukungan peningkatan Pengelolaan Sanggar Budaya	Kabupaten Flores Timur	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	12 Paket	
15	Pengembangan dan Promosi Pariwisata Meko	Adonara	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 paket	
16	Penataan tempat pariwisata pantai	Kabupaten Flores Timur	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Unit	
17	Peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata	Kabupaten Flores Timur	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Paket	
18	Pelestarian Budaya yang hampir puna	Kabupaten Flores Timur	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	1 Paket	
19	Pembangunan Tempat Wisata Air Panas di Wai Bao	Larantuka	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Paket	
20	Pengembangan Sanggar Budaya	Kabupaten Flores Timur	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1 Paket	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Kebijakan			Keterangan
	Kabupaten	Provinsi	Nasional	
1	Mendukung upaya pelestarian, pengkajian dan penelitian aspek kebudayaan, yang meliputi nilai tradisi, budaya, bahasa dan sastra, seni dan film serta sejarah purbakala	Mendukung upaya pelestarian, pengkajian dan penelitian aspek kebudayaan, yang meliputi nilai tradisi, budaya, bahasa dan sastra, seni dan film serta sejarah purbakala	Mendukung upaya pelestarian, pengkajian dan penelitian aspek kebudayaan, yang meliputi nilai tradisi, budaya, bahasa dan sastra, seni dan film serta sejarah purbakala	
2	Mendorong terlaksananya kegiatan pentas seni dan budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya lokal	Mendorong terlaksananya kegiatan pentas seni dan budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya lokal	Mendorong terlaksananya kegiatan pentas seni dan budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya lokal	
3	Menggerakkan elemen terkait seperti seniman, budayawan, sanggar seni dan masyarakat untuk lebih menghargai dan mencintai seni budaya dan memanfaatkannya secara optimal	Menggerakkan elemen terkait seperti seniman, budayawan, sanggar seni dan masyarakat untuk lebih menghargai dan mencintai seni budaya dan memanfaatkannya secara optimal	Menggerakkan elemen terkait seperti seniman, budayawan, sanggar seni dan masyarakat untuk lebih menghargai dan mencintai seni budaya dan memanfaatkannya secara optimal	
4	Melakukan inventarisasi potensi kawasan wisata untuk ditetapkan sebagai destinasi unggulan	Melakukan inventarisasi potensi kawasan wisata untuk ditetapkan sebagai destinasi unggulan	Melakukan inventarisasi potensi kawasan wisata untuk ditetapkan sebagai destinasi unggulan	

5	Mendorong terlaksananya berbagai atraksi wisata sebagai hiburan umum	Mendorong terlaksananya berbagai atraksi wisata sebagai hiburan umum	Mendorong terlaksananya berbagai atraksi wisata sebagai hiburan umum	
6	Melakukan inventarisasi potensi event budaya sebagai atraksi wisata dan penetapan skala event (core, major dan supporting)	Melakukan inventarisasi potensi event budaya sebagai atraksi wisata dan penetapan skala event (core, major dan supporting)	Melakukan inventarisasi potensi event budaya sebagai atraksi wisata dan penetapan skala event (core, major dan supporting)	
7	Mendorong terciptanya pelayanan administrasi dan pembinaan usaha pariwisata agar tercipta iklim usaha yg kondusif	Mendorong terciptanya pelayanan administrasi dan pembinaan usaha pariwisata agar tercipta iklim usaha yg kondusif	Mendorong terciptanya pelayanan administrasi dan pembinaan usaha pariwisata agar tercipta iklim usaha yg kondusif	
8	Penataan dan pengadaan model/ format pembinaan bagi pelaku usaha	Penataan dan pengadaan model/ format pembinaan bagi pelaku usaha	Penataan dan pengadaan model/ format pembinaan bagi pelaku usaha	

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kabupaten disesuaikan dengan kebijakan provinsi dan nasional. Hal ini bertujuan untuk sinkronisasi program pusat dan daerah yang dalam aplikasinya akan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi yang ada di daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

A. Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas obyek dan daya tarik wisata
2. Melestarikan budaya dan adat istiadat serta lingkungan hidup
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Meningkatkan PAD di sektor Pariwisata dan Kebudayaan
5. Meningkatkan kreativitas, penciptaan dan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha

6. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Pariwisata dan Kebudayaan
7. Keberpihakan kepada pengusaha menengah ke bawah
8. Meningkatnya kemitraan antar daerah, masyarakat dan pelaku usaha

B. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas obyek dan daya tarik wisata
2. Terlestarikannya budaya dan adat istiadat serta lingkungan hidup
3. Meningkatnya pendapatan per kapita
4. Meningkatnya PAD
5. Meningkatnya peluang kesempatan kerja sektor Kepariwisata
6. Meningkatnya kualitas SDM aparatur, baik dalam penyusunan program, perencanaan dan penatalaksanaan
7. Melibatkan dan memberdayakan pengusaha (pariwisata) menengah ke bawah dan membuka ruang investasi secara sehat dan positif
8. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam meningkatkan pembangunan sektor pariwisata daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan. Untuk Tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur merencanakan 9 (sembilan) program dan dijabarkan menjadi 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Ada 4 (empat) program rutin untuk mendukung administrasi perkantoran dan fasilitas sarana prasarana kinerja aparatur, dan ada 4 (empat) program lain yang mendukung urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada.

Dengan melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan clean governance.

Larantuka, 01 Oktober 2020

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur,

Apolonia Corebima, SE,M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19690718 199703 2 002

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2020
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
							Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	26,32%	100%	12 Bulan	26,32%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	14,80%	100%	12 Bulan	14,80%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	100%	12 Bulan	100,00%
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	8,63%	100%	12 Bulan	8,63%
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis pelayanan kebersihan perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	26,30%	100%	12 Bulan	26,30%

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
							Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	38,33%	100%	12 Bulan	38,33%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	25,04%	100%	12 Bulan	25,04%
8	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis pelayanan instalasi listrik dan penerangan perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	33,59%	100%	12 Bulan	33,59%
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	12 Bulan	12 Bulan	93,98%	100%	12 Bulan	93,98%
10	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disusun	12 Bulan	12 Bulan	8,82%	100%	12 Bulan	8,82%
11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis kegiatan penyediaan makanan dan minuman perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	23,18%	100%	12 Bulan	23,18%
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah jenis kegiatan rapat perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	43,77%	100%	12 Bulan	43,77%
13	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Jumlah jenis Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	74,97%	100%	12 Bulan	74,97%
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi						

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
							Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	4 unit	4 unit	95,47%	100%	4 unit	95,47%
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	12 Bulan	12 Bulan	11,13%	100%	12 Bulan	11,13%
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	12 Bulan	12 Bulan	55,46%	100%	12 Bulan	55,46%
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	8 Unit	8 Unit	62,35%	100%	8 Unit	62,35%
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	16 Unit	16 Unit	7,33%	100%	16 Unit	7,33%
C	Program Peningatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD						
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	22,13%	100%		22,13%
D	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase fasilitasi event seni dan kekayaan budaya						
1	Pengembangan Database sistem informasi sejarah purbakala	Jumlah dokumen yang disusun	520 Buku	520 Buku	69,37%	100%	520 Buku	69,37%
E	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan dan Jumlah destinasi wisata yang terpelihara	5 Destinasi	5 Destinasi				0,00%

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
							Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah Sarana Prasarana Wisata yang terbangun	3 Paket	3 Paket	21,48%	100%	3 Paket	21,48%
2	Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Jumlah pelaku usaha jasa dan industri kreatif yang dibina	35 Usaha Jasa	35 Usaha Jasa	100,00%	100%	35 Usaha Jasa	100,00%
F	Program Pengembangan Kemitraan	Presentase jumlah lembaga pariwisata yang dijadikan mitra	10 Mitra	10 Mitra				
	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata yang dibina dan kerjasama dengan lembaga lainnya	7 Pelatihan	7 Pelatihan	100,00%	100%	7 Pelatihan	100,00%
G	Program Pengembangan Nilai Budaya	Presentase jumlah jenis program pengembangan nilai budaya di OPD selama 12 bulan	10 Objek	10 Objek				0,00%
	Pelestrarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah jenis pelestarian adat budaya	10 Objek	10 Objek	100,00%	100%	10 Objek	100,00%
H	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Presentase pengembangan pemasaran pariwisata di OPD selama 12 bulan	17000 orang	17000 orang	100,00%	100%	17000 orang	100,00%
1	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah jenis media informasi dan pemasaran pariwisata	1 media	1 media	100,00%	100%	1 media	100,00%

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
							Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah jenis event promosi pariwisata	1 Event promosi pariwisata	1 Event promosi pariwisata	100,00%	100%	vent promosi pariwi	100,00%
3	Peningkatan Kemampuan SDM Penyuluh dan Duta Wisata	Jumlah SDM Penyuluh dan Duta Wisata	1 Frekuensi	1 Frekuensi	100,00%	100%	1 Frekuensi	100,00%
I	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Presentase pengelolaan keragaman budaya di OPD selama 12 bulan	5 Ragam Budaya	5 Ragam Budaya				
1	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah jenis event budaya	4 Festival	4 Festival	100,00%	100%	4 Festival	100,00%

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Flores Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	648.389.050	A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	648.389.050	
	1 Penyediaan Surat Menyurat	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	1.140.000	1 Penyediaan Surat Menyurat	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	1.140.000	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	59.301.000	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	59.301.000	
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	5.000.000	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	5.000.000	
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	41.734.050	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	41.734.050	
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis pelayanan kebersihan perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	7.605.000	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis pelayanan kebersihan perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	7.605.000	
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	15.654.000	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	15.654.000	
	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	14.775.000	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	14.775.000	
	8 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis pelayanan instalasi listrik dan penerangan perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	15.500.000	8 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis pelayanan instalasi listrik dan penerangan perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	15.500.000	
	9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Persentase jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	12 Bulan	7.892.500	9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Persentase jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	12 Bulan	7.892.500	
	10 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disusun	12 Bulan	4.140.000	10 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disusun	12 Bulan	4.140.000	
	11 Penyediaan makanan dan minuman	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis kegiatan penyediaan makanan dan minuman perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	9.060.000	11 Penyediaan makanan dan minuman	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis kegiatan penyediaan makanan dan minuman perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	9.060.000	
	12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis kegiatan rapat perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	149.080.000	12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis kegiatan rapat perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	149.080.000	
	13 Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	317.507.500	13 Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah jenis Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran bagi OPD selama 12 bulan	12 Bulan	317.507.500	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi		67.398.900	B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	0	67.398.900	
	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	4 unit	10.475.000	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	4 unit	10.475.000	
	2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	12 Bulan	20.423.900	2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	12 Bulan	20.423.900	
	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	12 Bulan	25.000.000	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	12 Bulan	25.000.000	
	4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	8 Unit	4.000.000	4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	8 Unit	4.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	16 Unit	7.500.000	5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik	16 Unit	7.500.000	
C	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Sarotari Tengah-Larantuka	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu		29.250.000	C Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Sarotari Tengah-Larantuka	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu	0	29.250.000	
	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah dokumen yang disusun	6 dokumen	29.250.000	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sarotari Tengah-Larantuka	Jumlah dokumen yang disusun	6 dokumen	29.250.000	
D	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Persentase fasilitasi event seni dan kekayaan budaya		94.907.000	D Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Persentase fasilitasi event seni dan kekayaan budaya	0	94.907.000	
	Pengembangan Database sistem informasi sejarah purbakala	Kabupaten Flores Timur	Jumlah dokumen yang disusun	520 Buku	94.907.000	Pengembangan Database sistem informasi sejarah purbakala	Kabupaten Flores Timur	Jumlah dokumen yang disusun	520 Buku	94.907.000	
E	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan dan Jumlah destinasi wisata yang terpelihara	5 Destinasi	3.142.295.521	E Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan dan Jumlah destinasi wisata yang terpelihara	5 Destinasi	3.142.295.521	
	1 Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Larantuka, Ile Boleng, Solor Barat, dan Luar Daerah Kab. Flores Timur	Jumlah Sarana Prasarana Wisata yang terbangun	3 Paket	3.083.683.020,50	1 Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Larantuka, Ile Boleng, Solor Barat, dan Luar Daerah Kab. Flores Timur	Jumlah Sarana Prasarana Wisata yang terbangun	3 Paket	3.083.683.021	
	2 Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Larantuka, Ile Boleng, Solor Barat, dan Luar Daerah Kab. Flores Timur	Jumlah pelaku usaha jasa dan industri kreatif yang dibina	35 Usaha Jasa	58.612.500	2 Pengembangan, Sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Larantuka, Ile Boleng, Solor Barat, dan Luar Daerah Kab. Flores Timur	Jumlah pelaku usaha jasa dan industri kreatif yang dibina	35 Usaha Jasa	58.612.500	
F	Program Pengembangan Kemitraan		Presentase jumlah lembaga pariwisata yang dijadikan mitra	10 Mitra	696.804.000	F Program Pengembangan Kemitraan		Presentase jumlah lembaga pariwisata yang dijadikan mitra	10 Mitra	696.804.000	
	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Kabupaten Flores Timur	Jumlah SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata yang dibina dan kerjasama dengan lembaga lainnya	7 Pelatihan	696.804.000	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Kabupaten Flores Timur	Jumlah SDM di bidang kebudayaan dan Pariwisata yang dibina dan kerjasama dengan lembaga lainnya	7 Pelatihan	696.804.000	
G	Program Pengembangan Nilai Budaya		Presentase jumlah jenis program pengembangan nilai budaya di OPD selama 12 bulan	10 Objek	123.530.200	G Program Pengembangan Nilai Budaya	0	Presentase jumlah jenis program pengembangan nilai budaya di OPD selama 12 bulan	10 Objek	123.530.200	
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kabupaten Flores Timur dan Luar Daerah	Jumlah jenis pelestarian adat budaya	10 Objek	123.530.200	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kabupaten Flores Timur dan Luar Daerah	Jumlah jenis pelestarian adat budaya	10 Objek	123.530.200	
H	Program pengembangan pemasaran pariwisata		Presentase pengembangan pemasaran pariwisata di OPD selama 12 bulan	17000 orang	1.022.387.750	H Program pengembangan pemasaran pariwisata		Presentase pengembangan pemasaran pariwisata di OPD selama 12 bulan	17000 orang	1.022.387.750	
	1 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Larantuka, Maumere, Larantuka dan Luar Daerah	Jumlah jenis media informasi dan pemasaran pariwisata	1 media	85.900.000	1 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Larantuka, Maumere, Larantuka dan Luar Daerah	Jumlah jenis media informasi dan pemasaran pariwisata	1 media	85.900.000	
	2 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Larantuka, Maumere, Larantuka dan Luar Daerah	Jumlah jenis event promosi pariwisata	1 Event promosi pariwisata	830.222.750	2 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Larantuka, Maumere, Larantuka dan Luar Daerah	Jumlah jenis event promosi pariwisata	1 Event promosi pariwisata	830.222.750	
	3 Peningkatan Kemampuan SDM Penyuluh dan Duta Wisata	Larantuka, Maumere, Larantuka dan Luar Daerah	Jumlah SDM Penyuluh dan Duta Wisata	1 Frekuensi	106.265.000	3 Peningkatan Kemampuan SDM Penyuluh dan Duta Wisata	Larantuka, Maumere, Larantuka dan Luar Daerah	Jumlah SDM Penyuluh dan Duta Wisata	1 Frekuensi	106.265.000	
I	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Presentase pengelolaan keragaman budaya di OPD selama 12 bulan	5 Ragam Budaya	792.648.500	I Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Presentase pengelolaan keragaman budaya di OPD selama 12 bulan	5 Ragam Budaya	792.648.500	
	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Flores Timur dan Luar NTT	Jumlah jenis event budaya	4 Festival	792.648.500	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Flores Timur dan Luar NTT	Jumlah jenis event budaya	4 Festival	792.648.500	

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Program Kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan

NO	USULAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU	SKPD/BIDANG/PROG/KEGIATAN	WAKTU
1	2	3	4	5	6
1	Penataan Lokasi Istana Raja Lantuka	1,00 / Paket	75.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 - Pariwisata 3.26.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.26.16.02 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumat, 20/03/2020 09:53
2	Peningkatan jalan Pariwisata	15,00 / Km	9.000.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 - Pariwisata 3.26.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.26.16.02 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Rabu, 18/03/2020 15:58
3	Pelatihan kelompok penggerak sadar wisata desa	1,00 / Paket	30.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 - Pariwisata 3.26.17 - Program Pengembangan Kemitraan 3.26.17.03 - Pengembangan SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya	Jumat, 13/03/2020 10:17
4	Pembangunan Joging Track pada kawasan wisata pantai	1,00 / Paket	250.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 - Pariwisata 3.26.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.26.16.02 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumat, 13/03/2020 10:07
5	Pembangunan Pos Pengaman Laut dan Mercusuar dalam mendukung Destinasi Pariwisata Mekko	1,00 / paket	250.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 - Pariwisata 3.26.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.26.16.02 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Sabtu, 14/03/2020 12:20
6	Pemugaran situs peninggalan sejarah Tugu Van Der Berg	1,00 / Paket	100.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.22 - Kebudayaan	Senin, 16/03/2020 17:32
				2.22.16 - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.22.16.02 - Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	

NO	USULAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU	SKPD/BIDANG/PROG/KEGIATAN	WAKTU
1	2	3	4	5	6
7	Pengembangan Obyek Wisata	3,00 / Unit	150.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 - Pariwisata 3.26.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.26.16.02 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Senin, 16/03/2020 16:45
8	Pengembangan Wisata Religius Trapist Lamanabi	1,00 / Paket	1.000.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 - Pariwisata 3.26.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.26.16.02 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Senin, 16/03/2020 10:09
9	Pembangunan MCK, dan Ruang ganti	1,00 / Paket	100.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 - Pariwisata 3.26.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.26.16.02 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Minggu, 15/03/2020 21:10
10	Penataan Lokasi Pulau Waibalun	1,00 / Paket	50.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 - Pariwisata 3.26.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.26.16.02 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumat, 20/03/2020 10:02
11	Pembangunan Gapura Tuan Meninu	1,00 / Paket	25.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 - Pariwisata 3.26.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.26.16.02 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumat, 20/03/2020 09:54
12	Pembangunan rabat jalan	3,00 / Paket	300.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 - Pariwisata 3.26.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.26.16.07 - Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi	Minggu, 15/03/2020 18:22
13	Inventaris unsur- unsur kebudayaan, advokasi, promosi dan pengembangan serta pembangunan museum sejarah.	1,00 / paket	100.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.22 - Kebudayaan 2.22.15 - Program Pengembangan Nilai Budaya 2.22.15.08 - Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Selasa, 17/03/2020 20:30
14	Dukungan peningkatan Pengelolaan	12,00 /	240.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Selasa, 17/03/2020 13:12

NO	USULAN	VOLUME/ SATUAN	PAGU	SKPD/BIDANG/PROG/KEGIATAN	WAKTU
1	2	3	4	5	6
	Sanggar Budaya	Paket		2.22 - Kebudayaan 2.22.16 - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.22.16.01 - Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	
15	Pengembangan dan Promosi Pariwisata Meko	1,00 / paket	200.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 - Pariwisata 3.26.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.26.16.02 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Selasa, 17/03/2020 12:58
16	Penataan tempat pariwisata pantai	1,00 / Unit	50.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 - Pariwisata 3.26.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.26.16.02 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Senin, 16/03/2020 14:05
17	Peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata	1,00 / Paket	50.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 - Pariwisata 3.26.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.26.16.02 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Senin, 16/03/2020 14:04
18	Pelestarian Budaya yang hampir puna	1,00 / Paket	20.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.22 - Kebudayaan 2.22.16 - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.22.16.01 - Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Senin, 16/03/2020 13:47
19	Pembangunan Tempat Wisata Air Panas di Wai Bao	1,00 / Paket	500.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3.26 - Pariwisata 3.26.16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Minggu, 15/03/2020 19:14
				3.26.16.02 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	
20	Pengembangan Sanggar Budaya	1,00 / Paket	100.000.000,00	2.22.0101 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.22 - Kebudayaan 2.22.17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.22.17.01 - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumat, 13/03/2020 10:02
Total Pagu			12.590.000.000,00		

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020

[illegible]

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatn SKPD Tahun 2020
dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Flores Timur**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan maju rencana tahun 2020	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Total				11.501.769.471				12.076.857.945
1	17					Program SKPD				1.036.697.364				1.088.532.232
1	17	1	1	1		Program Pelayanan			100%	601.458.766				631.531.704
1	17	1	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Larantuka	105 kali	1.150.000	DAU		120 kali	1.207.500
1	17	1	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	Larantuka	12 bulan	59.295.600	DAU		12 bulan	62.260.380
1	17	1	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas operasional	Larantuka	12 unit	6.000.000	DAU		12 unit	6.300.000
1	17	1	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan	Larantuka	12 bulan	40.468.470	DAU		12 bulan	42.491.894
1	17	1	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Larantuka	12 kali	8.255.284	DAU		12 kali	8.668.048
1	17	1	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Larantuka	36 jenis	15.980.659	DAU		34 jenis	16.779.692
1	17	1	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Larantuka	2 paket	14.784.578	DAU		2 paket	15.523.807
1	17	1	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Larantuka	2 Komponen	7.592.550	DAU		2 komponen	7.972.178
1	17	1	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Larantuka	1 paket	8.287.125	DAU		1 paket	8.701.481
1	17	1	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Pos Kupang, Flores Pos dan Warta Flobamora	Larantuka	732 bacaan	4.140.000	DAU		732 bacaan	4.347.000
1	17	1	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Larantuka	760 0m	19.910.000	DAU		798 om	20.905.500
1	17	1	1	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi	Dalam dan Luar Daerah	25 paket perjalanan	109.294.500	DAU		22 kali	114.759.225

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan maju rencana tahun 2020	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17	1	1	1	20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Larantuka	19 orang	306.300.000	DAU		18 orang	321.615.000
1	17	1	1	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Larantuka	100%	276.418.380	DAU			290.239.299
1	17	1	1	2	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Larantuka	3 unit	98.175.000	DAU		3 unit	98.175.000
1	17	1	1	2	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Larantuka	2 paket	50.000.000	DAU		2 paket	52.500.000
1	17	1	1	2	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Larantuka	4 jenis	52.500.000	DAU		4 jenis	55.125.000
1	17	1	1	2	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Larantuka	10 unit	13.020.000	DAU		10 unit	13.671.000
1	17	1	1	2	22	Pemeliharaan Rutin Berkala	Terpeliharanya gedung kantor	Larantuka	30 jenis	22.718.380	DAU			23.854.299
1	17	1	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit kendaraan dinas yang dipelihara	Larantuka	14 unit	27.930.000	DAU		14 unit	29.326.500
1	17	1	1	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Larantuka	8 unit	4.200.000	DAU		8 unit	4.410.000
1	17	1	1	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Larantuka	16 unit	7.875.000	DAU		16 unit	8.268.750
1	17	1	1	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya			137.812.500	DAU			144.703.125
1	17	1	1	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	Dalam dan Luar Daerah	13 orang	137.812.500	DAU		13 orang	144.703.125
1	17	1	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			21.007.718	DAU			22.058.104
1	17	1	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku laporan capaian kinerja dan keuangan	Larantuka	13 dokumen	21.007.718	DAU		13 dokumen	22.058.104
						URUSAN KEBUDAYAAN				1.616.180.848				1.696.989.890
1	17	1	1	15		Program Pengembangan Nilai Budaya				210.884.200	DAU			221.428.410
1	17	1	1	15	04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan nilai budaya	Tersedianya buku laporan monev	Larantuka	1 buku	78.750.000	DAU		1 buku	82.687.500

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan maju rencana tahun 2020	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Tersedianya adat budaya yang diakomodir dan dilestarikan	Larantuka	10 jenis	132.134.200	DAU		10 jenis	138.740.910
1	17	1	1	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				307.943.730	DAU			323.340.917
1	17	1	1	16	01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Tersedianya pengelola kekayaan budaya	Larantuka	25 orang	157.943.730	DAU		25 orang	165.840.917
1	17	1	1	16	13	Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala	Tersedianya database sistem sejarah purbakala	Larantuka	51 buku	150.000.000	DAU		1 naskah	157.500.000
1	17	1	1	24		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tersedianya tenaga penggiat seni budaya		Jumlah penggiat seni budaya	1.097.352.918	DAU			1.152.220.564
1	17	1	1	24	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Tesedianya jumlah pengembangan kesenian dan kebudayaan tingkat	Larantuka	2 kegiatan	315.000.000	DAU		2 kegiatan	330.750.000
					05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Tersedianya jumlah pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Larantuka dan luar kabupaten Flores Timur	4 festival	607.352.918	DAU		4 festival	637.720.564
1	17	1	1	17	06	Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi	Tersedianya pelaku pengelola keragaman budaya	Larantuka	150 orang	175.000.000	DAU		150 orang	183.750.000
						PARIWISATA				8.848.891.259				9.291.335.822
1	17	1	1	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				5.455.601.300	DAU, DAK			5.728.381.365
1	17	1	1	16	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Tersedianya sarana prasarana obyek wisata yang diadakan	Larantuka, Ile Boleng, Wulanggintang, Tanjung Bunga, Witihama, Solor Barat	14 paket	5.143.049.282	DAU, DAK		14 paket	5.400.201.746
					07	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan	Tersedianya usaha jasa pariwisata	Larantuka	1 dokumen	62.552.018	DAU		1 dokumen	65.679.619
					16	Pembuatan master Plan Pariwisata	Tersedianya dokumen master plan penataan potensi obyek wisata	KSP Ritaebang (Wulanggintang)	1 dokumen	250.000.000	DAU		1 dokumen	262.500.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan maju rencana tahun 2020	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17	1	1	17		Program Pengembangan Kemitraan	Terlaksananya kegiatan kemitraan pariwisata			652.804.058	DAU			685.444.261
1	17	1	1	17	03	Pengembangan SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga	Terlaksananya Workshop manajemen pengelolaan pariwisata	Larantuka	1 kegiatan	652.804.058	DAU, DAK		1 kegiatan	685.444.261
1	17	1	1	23		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata berupa promosi secara terpadu, sistematis dan berkesinambungan	Larantuka dan luar kabupaten Flores Timur	Kegiatan promosi di dalam dan di luar negeri	2.740.485.901	DAU			2.877.510.196
1	17	1	1	23	01	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata	Tersedianya dokumen analisa pasar wisata	Larantuka	1 dokumen	1.394.127.788	DAU		17000 wisatawan	1.463.834.177
					02	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam	Tersedianya website pariwisata	Larantuka	1 paket	192.937.500	DAU		1 paket	202.584.375
					03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Terciptanya jaringan kerjasama promosi tentang pemasaran pariwisata antara para pelaku usaha pariwisata	Larantuka	1 kegiatan	75.000.000	DAU		1 kegiatan	78.750.000
1	17	1	1	23	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata	Larantuka dan luar kabupaten Flores Timur	2 kegiatan	894.670.613	DAU		2 kegiatan	939.404.144
					09	Peningkatan kemampuan SDM penyuluh dan duta wisata	Tersedianya penyuluh dan duta wisata	Larantuka dan luar kabupaten Flores Timur	1 kegiatan	183.750.000	DAU		1 kegiatan	192.937.500

Larantuka, 11 Maret 2019
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur ,

Apolonia Corebima, SE,M.Si

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan maju rencana tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pembina Utama Muda
Nip. 19690718 199703 2 002